

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi pola hubungan desentralistik. Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah kemandirian daerah dalam mengelola dan mengurus seluruh aspek pemerintahan daerah baik dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius pemerintah daerah dalam memberikan berbagai fasilitas pendukung investasi. Salah satunya yaitu Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih besar untuk tujuan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi. Jawa Barat sebagai salah satu Provinsi di Indonesia juga dituntut untuk dapat mengelola dana APBD secara efektif dan efisien guna tercapainya tujuan pembangunan daerah. Sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, Jawa Barat sendiri dianugerahi oleh melimpahnya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang membuat Jawa Barat menjadi salah satu Provinsi

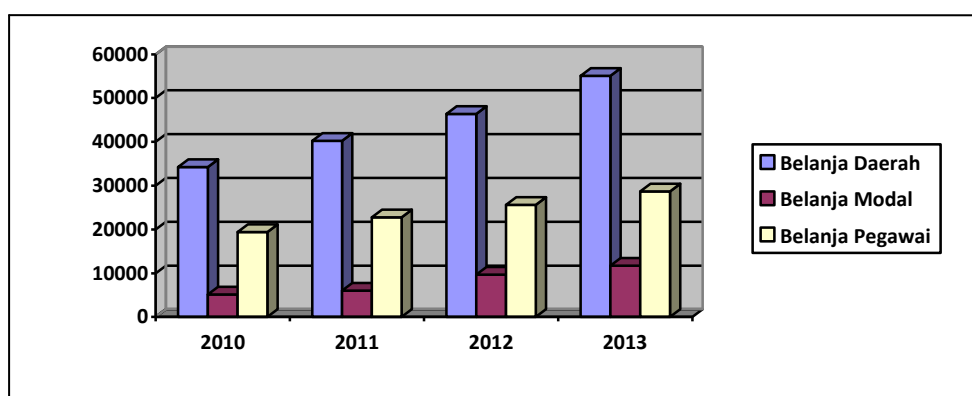
Irvan Santoso, 2015

PENGARUH BELANJA MODAL, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, DAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IMPLIKASINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penggerak roda perekonomian di Indonesia. Potensi sumber daya yang melimpah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk mulai berinvestasi di daerah tersebut. Namun potensi besar yang ditawarkan daerah tidak serta merta membuat investor bersedia untuk berinvestasi. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan oleh investor untuk mulai berinvestasi seperti faktor infrastruktur, perizinan, keamanan, ketersediaan tenaga kerja dan lain-lain. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian terhadap faktor – faktor penunjang iklim investasi di daerah karena dengan semakin meningkatnya iklim investasi maka akan meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Kegiatan pembangunan di daerah dapat terlihat dari adanya pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan perekonomian seperti pembangunan jalan raya, jalan tol, terminal, pasar dan lain-lain. Pemerintah Daerah sendiri memiliki anggaran khusus dalam APBD guna pembangunan fasilitas tersebut yang terwujud dalam anggaran belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran daerah untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari satu tahun. Berikut adalah gambaran mengenai realisasi belanja modal dan belanja daerah seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2013:



Sumber : BPS (2014), Data diolah

Irvan Santoso, 2015

PENGARUH BELANJA MODAL, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, DAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IMPLIKASINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gambar 1.1
Realisasi Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Belanja Daerah Seluruh
Pemerintah Kab/kota Provinsi Jawa Barat 2010-2013
(Dalam Milyar Rupiah)

Dari gambar tersebut, dapat terlihat bahwa proporsi belanja modal terhadap belanja daerah masih lebih kecil dibanding proporsi belanja pegawai terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat lebih didominasi oleh pos belanja pegawai. Sedangkan pos belanja modal yang pada hakikatnya merupakan belanja yang diarahkan pada kegiatan pembangunan masih lebih kecil dibanding belanja pegawai. Menurut Halim (2004) dikemukakan bahwa dalam jangka panjang kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur ini akan meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah yang akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Lalu menurut Wong (2004) dalam Adi (2006) bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Adi (2006) menyatakan bahwa Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan beberapa pandangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Selain faktor infrastruktur, kegiatan perekonomian di daerah sangat dipengaruhi oleh faktor iklim investasi di daerah tersebut. Marak atau lesunya kegiatan perekonomian daerah dapat terlihat dari seberapa besar aliran modal yang masuk ke daerah yang akan memicu laju perekonomian di daerah tersebut. Menurut Sukirno (2006) bahwa penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi di masa depan dan perkembangan ini

Irvan Santoso, 2015

PENGARUH BELANJA MODAL, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, DAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IMPLIKASINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menstimulus pertumbuhan produksi secara nasional/regional dan juga kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah. Investasi yang terjadi di daerah dapat berasal dari modal dalam negeri maupun modal luar negeri (asing). Tingkat investasi di daerah ini dapat terlihat dari tingkat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Berikut adalah gambaran umum mengenai nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat :

Tabel 1.1
Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA) Kab/kota di Provinsi di Jawa Barat
tahun 2010-2013

Tahun	Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)	Nilai Realisasi PMA (Miliar Rupiah)	Total Nilai Investasi (Miliar Rupiah)
2010	18.660,5	27.942,1	46.602,6
2011	7.305,6	41.445,6	48.751,2
2012	16.023,9	36.656,6	52.680,5
2013	26.018,1	67.500,9	93.518,9

Sumber : BPMPT Provinsi Jabar (2015), Data diolah

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa nilai realisasi PMDN Kabupaten/Kota di Jawa Barat nilainya dari tahun 2010-2013 berfluktuasi namun cenderung meningkat sejak terjadi penurunan di tahun 2011. Sedangkan nilai realisasi PMA Kabupaten/Kota di Jawa Barat dari tahun 2010-2013 juga mengalami fluktuasi di tiap tahunnya. Penelitian Wihda (2013) menunjukkan bahwa tingkat investasi (PMDN dan PMA) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dipengaruhi oleh jumlah aliran modal yang masuk ke daerah tersebut guna menggerakkan faktor-faktor produksi di daerah. Penelitian Trisnu dan Purbadharmaja (2014) terkait tingkat investasi swasta di daerah juga menunjukkan bahwa tingkat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan

Irvan Santoso, 2015

PENGARUH BELANJA MODAL, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, DAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IMPLIKASINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penanaman Modal Asing (PMA) baik secara parsial dan secara simultan mempengaruhi pendapatan regional daerah dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Bali. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat investasi di daerah juga dapat memicu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat memberikan gambaran mengenai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto daerah tersebut. Berikut adalah gambaran umum mengenai laju pertumbuhan ekonomi provinsi - provinsi yang berada di Pulau Jawa :

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2010-2013 (dalam persen)

Provinsi	2010	2011	2012	2013
DKI Jakarta	6,50	6,73	6,53	6,11
Jawa Barat	6,20	6,51	6,28	6,06
Jawa Tengah	5,84	6,03	6,34	5,81
D.I.Y	4,88	5,17	5,32	5,40
Jawa Timur	6,68	7,22	7,27	6,55
Banten	6,11	6,38	6,15	5,86

Sumber : BPS (2014)

Dari data tersebut terlihat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi-Provinsi yang di berada Pulau Jawa mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Provinsi dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,92% sedangkan Provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah yaitu Provinsi D.I.Y dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19%. Provinsi Jawa Barat sendiri cukup stabil dalam kegiatan perekonomian

Irvan Santoso, 2015

PENGARUH BELANJA MODAL, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, DAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IMPLIKASINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,26%. Mengingat potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Provinsi Jawa Barat seharusnya Pemerintah Daerah Jawa Barat bisa lebih baik lagi dalam menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan laju perekonomian di daerahnya.

Dampak dari adanya pembangunan yang berkelanjutan yaitu meningkatkan kegiatan perekonomian daerah yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah sendiri digunakan oleh Pemerintah daerah guna membiayai pembangunan daerahnya masing-masing. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas Kabupaten dan Kota di Indonesia masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerahnya masing-masing. Berikut adalah gambaran umum mengenai nilai realisasi Pendapatan Daerah seluruh Pemerintah daerah Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2010 hingga tahun 2013 :

Tabel 1.3
Realisasi Pendapatan Daerah
Kab/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2013
(dalam miliar rupiah)

	2010	2011	2012	2013
PAD	3.640,6	5.868,9	7.909,5	10.200,6
Dana Perimbangan	23.634,2	24.990,7	30.599,4	32.767,5
Lain Lain Pendapatan yang sah	6.312,1	10.704,7	9.663,4	12.879,8
Total	33.586,9	41.564,3	48.172,4	55.847,9

(Sumber : Badan Pusat Statistik: 2014), Data diolah

Dalam data tersebut terlihat jelas bahwa ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Sumber pendapatan terbesar pemerintah daerah masih bersumber dari dana transfer (Dana Perimbangan) dari pemerintah pusat sedangkan proporsi Pendapatan Asli daerah

Irvan Santoso, 2015

PENGARUH BELANJA MODAL, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, DAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IMPLIKASINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terhadap pendapatan daerah masih lebih kecil dibanding sumber pendapatan daerah yang lain. Pemerintah daerah seharusnya dapat memaksimalkan potensi daerah mereka masing masing dengan menggenjot sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai pembangunan daerah tersebut. Tujuan dari adanya Dana Perimbangan sebenarnya adalah untuk pemerataan fiskal bagi daerah yang potensi penerimaan daerahnya rendah. Sehingga diharapkan dengan adanya dana perimbangan ini, daerah yang potensi penerimaan daerahnya kecil dapat menggali sumber-sumber potensi pendapatan dari daerahnya tersebut.

Fenomena terkait ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Menurut Halim (2004), sektor Pendapatan Daerah memegang peranan penting dalam pembangunan suatu daerah karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya. Namun dalam realita di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan guna membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor keterbatasan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi sumber Pendapatan daerah berupa keterbatasan sumber dana maupun kendala dalam kemampuan dan sistem pengelolaan serta administrasi pemerintah daerah itu sendiri (Halim, 2004). Untuk itu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah. Penelitian Santosa dan Rahayu (2005) terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan, penduduk dan produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kediri. Sejalan dengan hal tersebut, Penelitian Abdurahman (2013) menunjukkan bahwa tingkat investasi dan pengeluaran pemerintah juga

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Berau Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh Belanja Modal dan tingkat investasi swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan implikasinya pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti yaitu Kabupaten dan Kota di Povinsi Jawa Barat. Selain itu penelitian ini menggunakan data rentang waktu tahun 2008-2013. Penelitian ini penulis beri judul **“PENGARUH BELANJA MODAL, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IMPLIKASINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH: Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013”**

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat ?
3. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat ?
4. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat ?

Irvan Santoso, 2015

PENGARUH BELANJA MODAL, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, DAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IMPLIKASINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis di lapangan.

1. Secara teoritis

Bagi penulis penelitian ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, karena penulis dapat memperoleh wawasan terkait bidang Akuntansi Pemerintahan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Akuntansi khususnya dalam hal Akuntansi Keuangan Daerah.

2. Secara praktis

Bagi Pemerintah Daerah terkait, diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) khususnya

dalam hal manajemen keuangan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

Irvan Santoso, 2015

PENGARUH BELANJA MODAL, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, DAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IMPLIKASINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu